

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

Tugas AdvoKAI dalam Menegakkan Kembali Negara Hukum Indonesia

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Vice President KAI - Guru Besar HTN
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Rapat Kerja Nasional
Kongres Advokat Indonesia
Bali, 30 Mei 2022

Alur Pembahasan

1. Advokat KAI sebagai Ujung Tombak Menegakkan Kembali Negara Hukum

2. Belajar dari Negara Lain (Australia, Kanada, Singapura, USA)

3. Perihal Kewenangan Advokat

denny@integritylawfirm.id



1| Advokat KAI sebagai Ujung Tombak Menegakkan Kembali Negara Hukum

denny@integritylawfirm.id



Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

"Indonesia adalah Negara Hukum."

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (*rechsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata (*machtstaat*).

Bagaimana faktualnya?

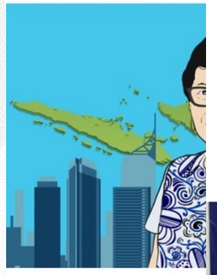
denny@integritylawfirm.id

"UU IKN Hanya Jadi Justifikasi Kebijakan Politik Penguasa"

Reporter: Haris Prabowo

tirto.id - 18 Feb 2022 21:00 WIB

View non-AMP ver



UU IKN dan Cipt
bahwa hukum di
melegalkan tind
dari banyak piha
hadapan Joko W

merdeka.com

Indeks Persepsi Korupsi Turun, ICW Sindir Revisi UU KPK & Kepentingan Oligarki

Bos Kampung Narkoba Dibebaskan, Marwah Peradilan Hancur

Pertanyakan Integritas Hakim, Fordayak Desak Sanksi Adat



KPK Tunjukkan Barang Bu
Menteri Kelautan dan Per
Prabowo. ©2020 Liputan
Fithriansyah

Jum, 27 Mei 2022



Ilustrasi. (M Faisal/Radar Sam

UU Minerba Dibahas Kilat, DPR Manjakan Oligarki Tambang & Istana

Reporter: Haris Prabowo

tirto.id - 13 Mei 2020 14:00 WIB

View non-AMP version at tirto.id



RUU Minerba yang resmi disahkan menjadi UU setelah dibahas kilat di DPR, menuai banyak protes dan dinilai menguntungkan korporasi tambang serta tidak

DOMINASI KEKUASAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari cita-cita *rechtsstaat*. Saat ini, Indonesia cenderung menjadi ***machtstaat*** (negara kekuasaan).

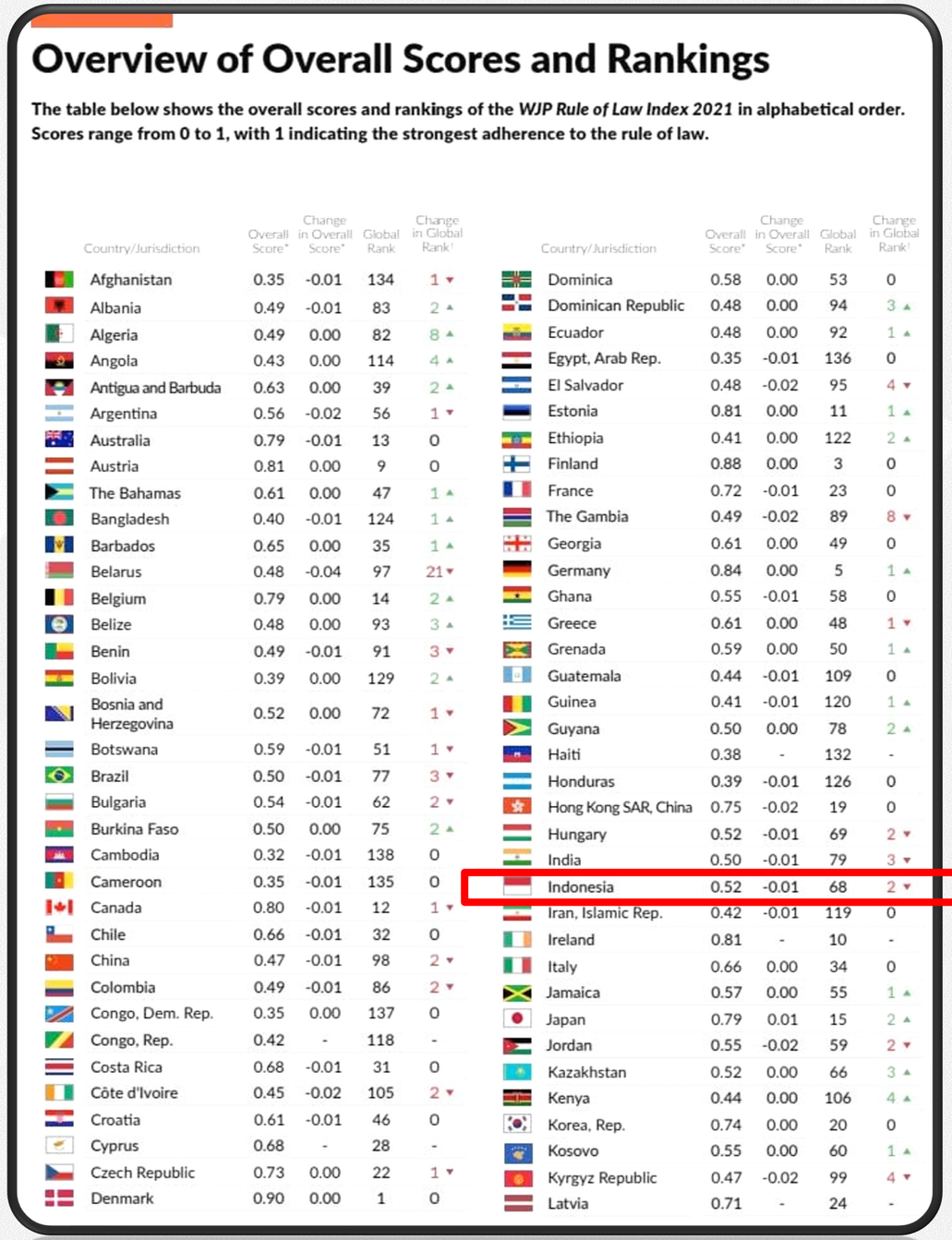
denny@integritylawfirm.id

Pada kenyataannya **Daulat Rakyat (Demokrasi)** telah dikalahkan oleh **Daulat Duit (Duitokrasi)**, seolah hukum hanyalah perjanjian transaksional oleh penegak hukum dan oligarki. Alhasil penegakan hukum yang ada di Indonesia hanyalah berpihak pada “duit” semata.

- Denny Indrayana



denny@integritylawfirm.id



Overview of Overall Scores and Rankings

The table below shows the overall scores and rankings of the *WJP Rule of Law Index 2021* in alphabetical order. Scores range from 0 to 1, with 1 indicating the strongest adherence to the rule of law.

Country/Jurisdiction	Overall Score*	Change in Overall Score*	Global Rank	Change in Global Rank†
Afghanistan	0.35	-0.01	134	1 ▼
Albania	0.49	-0.01	83	2 ▲
Algeria	0.49	0.00	82	8 ▲
Angola	0.43	0.00	114	4 ▲
Antigua and Barbuda	0.63	0.00	39	2 ▲
Argentina	0.56	-0.02	56	1 ▼
Australia	0.79	-0.01	13	0
Austria	0.81	0.00	9	0
The Bahamas	0.61	0.00	47	1 ▲
Bangladesh	0.40	-0.01	124	1 ▲
Barbados	0.65	0.00	35	1 ▲
Belarus	0.48	-0.04	97	21 ▼
Belgium	0.79	0.00	14	2 ▲
Belize	0.48	0.00	93	3 ▲
Benin	0.49	-0.01	91	3 ▼
Bolivia	0.39	0.00	129	2 ▲
Bosnia and Herzegovina	0.52	0.00	72	1 ▼
Botswana	0.59	-0.01	51	1 ▼
Brazil	0.50	-0.01	77	3 ▼
Bulgaria	0.54	-0.01	62	2 ▼
Burkina Faso	0.50	0.00	75	2 ▲
Cambodia	0.32	-0.01	138	0
Cameroon	0.35	-0.01	135	0
Canada	0.80	-0.01	12	1 ▼
Chile	0.66	-0.01	32	0
China	0.47	-0.01	98	2 ▼
Colombia	0.49	-0.01	86	2 ▼
Congo, Dem. Rep.	0.35	0.00	137	0
Congo, Rep.	0.42	-	118	-
Costa Rica	0.68	-0.01	31	0
Côte d'Ivoire	0.45	-0.02	105	2 ▼
Croatia	0.61	-0.01	46	0
Cyprus	0.68	-	28	-
Czech Republic	0.73	0.00	22	1 ▼
Denmark	0.90	0.00	1	0
Dominica	0.58	0.00	53	0
Dominican Republic	0.48	0.00	94	3 ▲
Ecuador	0.48	0.00	92	1 ▲
Egypt, Arab Rep.	0.35	-0.01	136	0
El Salvador	0.48	-0.02	95	4 ▼
Estonia	0.81	0.00	11	1 ▲
Ethiopia	0.41	0.00	122	2 ▲
Finland	0.88	0.00	3	0
France	0.72	-0.01	23	0
The Gambia	0.49	-0.02	89	8 ▼
Georgia	0.61	0.00	49	0
Germany	0.84	0.00	5	1 ▲
Ghana	0.55	-0.01	58	0
Greece	0.61	0.00	48	1 ▼
Grenada	0.59	0.00	50	1 ▲
Guatemala	0.44	-0.01	109	0
Guinea	0.41	-0.01	120	1 ▲
Guyana	0.50	0.00	78	2 ▲
Haiti	0.38	-	132	-
Honduras	0.39	-0.01	126	0
Hong Kong SAR, China	0.75	-0.02	19	0
Hungary	0.52	-0.01	69	2 ▼
India	0.50	-0.01	79	3 ▼
Indonesia	0.52	-0.01	68	2 ▼
Iran, Islamic Rep.	0.42	-0.01	119	0
Ireland	0.81	-	10	-
Italy	0.66	0.00	34	0
Jamaica	0.57	0.00	55	1 ▲
Japan	0.79	0.01	15	2 ▲
Jordan	0.55	-0.02	59	2 ▼
Kazakhstan	0.52	0.00	66	3 ▲
Kenya	0.44	0.00	106	4 ▲
Korea, Rep.	0.74	0.00	20	0
Kosovo	0.55	0.00	60	1 ▲
Kyrgyz Republic	0.47	-0.02	99	4 ▼
Latvia	0.71	-	24	-

Bagaimana Tren Indeks Rule of Law Indonesia?

Terus menurun dalam kurun waktu **5 tahun terakhir**

WJP: Indeks Negara Hukum RI 2021 Turun, Peringkat 68 dari 139 negara

Safyra Primadhyta | CNN Indonesia

Jumat, 24 Des 2021 03:20 WIB

denny@integritylawfirm.id

BAGAIMANA KONTRIBUSI PROFESI ADVOKAT?



"Ada demoralisasi dalam profesi advokat di Indonesia."

- Todung Mulya Lubis

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalam proses pengadilan pun ada tawar menawar mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan dalam perkara pidana atau tentang siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam perkara perdata."

- Adnan Buyung Nasution



Sumber: Soerjono Soekanto, 1999, hlm. 90.

denny@integritylawfirm.id



Hentikan Distorsi Makna Menjadi Advokat "Hebat".

Terdapat 'selintingan' di dunia 'advokat':

Advokat yang baik adalah yang mengerti hukumnya

Advokat yang hebat adalah yang "***mengerti***" Polisi, Jaksa, dan Hakim

denny@integritylawfirm.id

Seharusnya:

Kombinasi antara **pemahaman hukum** yang kokoh serta **fakta hukum** yang kuat, disajikan dengan **sistematika** yang runtut.

Faktanya *(meskipun tidak semua)*:

Negosiasi transaksional semata. UUD > Ujung-Ujungnya Duit.



denny@integritylawfirm.id

Problematika Advokat di Indonesia

7 Februari 2018

DAFTAR ADVOKAT YANG DIJERAT UU TIPIKOR

Nama	Kasus	Tahun	Vonis
Tengku Syaifuddin Popon	Suap	2005	2 tahun 8 bulan (Pengadilan Tipikor)
Harini Wijoso	Suap	2005	3 tahun penjara (Kasasi MA)
Adner Sirait	Suap	2010	4 tahun 6 bulan (Pengadilan Tipikor)
Mohammad Hasan bin Khus	Mengghalang-halangi penyidikan	2013	7 tahun (Pengadilan Tipikor)
Azmi bin Muhammad Yusuf	Menghalang-halangi penyidikan	2013	7 tahun (Pengadilan Tipikor)
Mario C Bernardo	Suap	2013	4 tahun (Pengadilan Tipikor)
Susi Tur Andayani	Menjadi perantara suap	2014	7 tahun penjara (Putusan kasasi MA)
M. Yagari Bhastara Guntur	Suap	2015	2 tahun penjara (Pengadilan Tipikor)
OC Kaligis	Suap	2015	10 tahun (Kasasi MA) dan dikurangi menjadi 7 tahun di tingkat PK
Raoul Adithya Wiranatakusumah	Suap	2015	2 tahun penjara (Pengadilan Tipikor)
Berta Natalia	Suap	2016	2 tahun 6 bulan penjara (Pengadilan Tipikor)
Kasman Sangaji	Suap	2016	3,5 tahun penjara (Pengadilan Tipikor)
Samsul	Suap	2016	2 tahun 6 bulan (Pengadilan Tipikor)
Awang Lazuardi Embat	Suap	2016	3,5 tahun (Pengadilan Tipikor)
Akhmad Zaini	Suap	2017	2,5 tahun (Pengadilan Tipikor)
Frederich Yunadi	Menghalang-halangi penyidikan	2017	2,5 tahun (Pengadilan Tipikor)

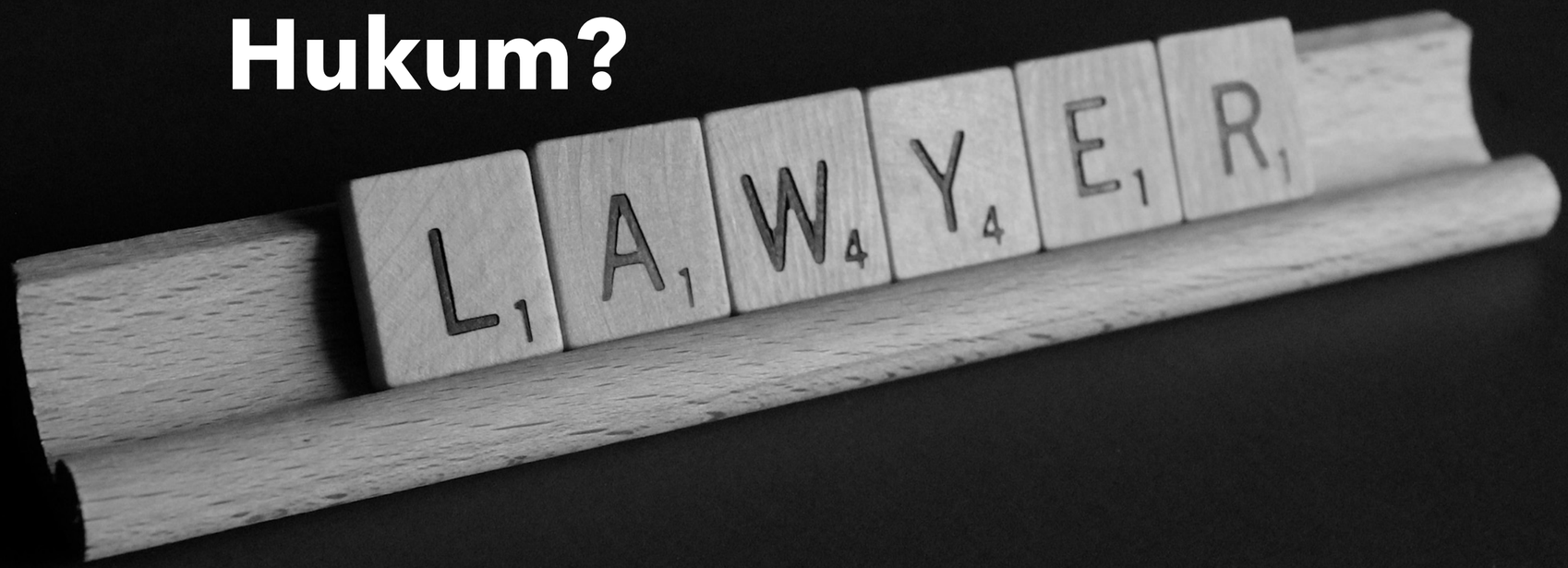
Sumber: Dokumen ICW 2017 Infografik: Rangga

Sumber: Tirto.id, 2018

Alih-alih menegakkan hukum dan keadilan, beberapa advokat justru terlibat dalam pelanggaran hukum, terutama pada kasus mafia peradilan

denny@integritylawfirm.id

Lalu Bagaimana Menjaga Marwah Advokat dalam menegakkan Kembali Negara Hukum?



Berpegang teguh pada
INTEGRITAS.

denny@integritylawfirm.id

STRATEGI JIKA PERKARA MANDEK

Lebih baik berkelahi, daripada tunduk pada kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Tempuh seluruh proses laporan internal seperti:

- Dalam hal kepolisian melalui Lembaga: WASSIDIK dan PROPAM
- Dalam hal lembaga eksekutif melalui Lembaga: INSPEKTORAT dan BKN
- Dalam hal kekuasaan kehakiman melalui Lembaga: SIWAS dan KY.

denny@integritylawfirm.id

Apakah Kita Advokat Dianggap Sejajar Dengan Aparat Penegak Hukum Lain?

detiknews

Home Berita Jabodetabek Internasional detikX Kolom Blak Blakan Pro Kontra

Adsmart Terpopuler Jawa Barat Jawa Tengah & DIY Jawa Timur Makassar Medan

detikNews > Berita Jawa Timur

Viral Pengacara di Banyuwangi Hamburkar Uang Rp 40 Juta di Depan Kantor Polisi

Ardian Fanani - detikNews

Senin, 15 Nov 2021 18:17 WIB

PERISTIWA DAERAH

Viral, Pengacara di Banyuwangi Hamburkan Uang Puluhan Juta di Teras Kantor Polisi

Selasa, 16 November 2021 - 15:57 | 32.94k

Terungkap, Ini Alasan Pengacara di Banyuwangi Hamburkan Uang Rp40 Juta di Polsek

Eris Utomo · Selasa, 16 November 2021 - 03:28:00 WIB



Akhir tahun lalu, viral seorang Advokat menyebar uang di Mapolsek Banyuwangi karena Kanit Reskrim Polsek tersebut meminta kepada kliennya agar tidak perlu pakai advokat. Lebih baik feenya bayar ke polres saja.

denny@integritylawfirm.id



Pasal 4 UU No. 18/2003

"Bahwa Advokat dalam menjalankan tugasnya telah bersumpah untuk tidak menjanjikan sesuatu kepada pejabat hukum agar memenangkan atau menguntungkan klien."

Advokat *Officium Nobile*

denny@integritylawfirm.id

Merindukan Sosok Advokat Berintegritas

Bukan soal menang-kalah,
tapi soal mengemukakan kebenaran

- Yap Thiam Hien



Citra advokat seharusnya:

Tegakkan hukum demi keadilan,
Jangan sampai dekati oknum demi berlian.

denny@integritylawfirm.id



3 Elemen Peran Advokat Untuk Menegakkan Kembali Negara Hukum:

a) Berpegang teguh pada etika

The laws set minimum standards of ethical behavior. Ethical people go beyond the laws.

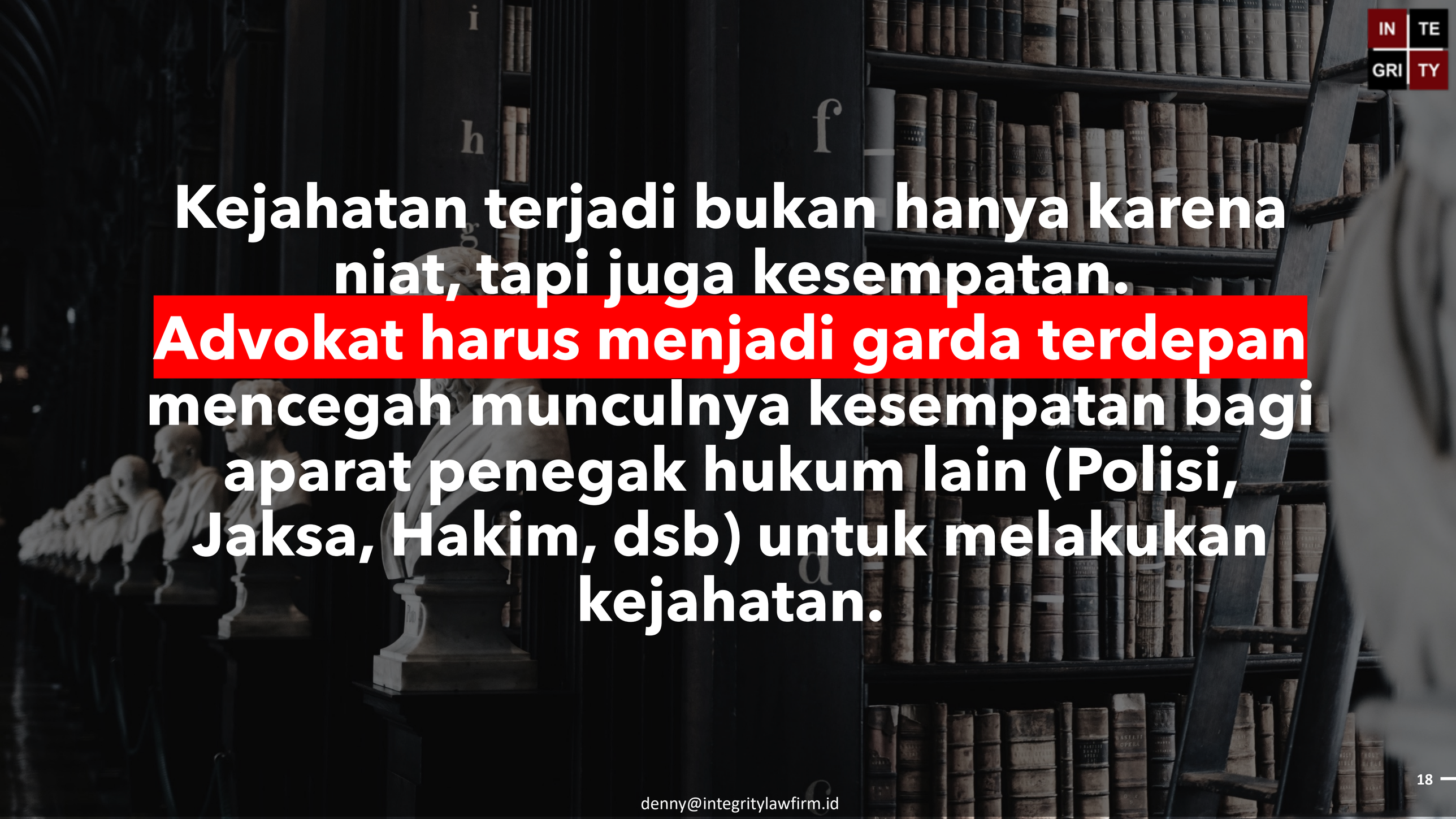
b) Keberanian

Berani berbeda demi kebenaran. Berani melawan arus. Berani memperjuangkan kebenaran.

c) Solideritas

Advokat KAI dan seluruh advokat Indonesia harus memiliki pemikiran yang sama dalam menegakkan kembali negara hukum. Jangan sampai ada yang memancing di air keruh.

denny@integritylawfirm.id



Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat, tapi juga kesempatan.

Advokat harus menjadi garda terdepan mencegah munculnya kesempatan bagi aparat penegak hukum lain (Polisi, Jaksa, Hakim, dsb) untuk melakukan kejahatan.

denny@integritylawfirm.id



2|Belajar dari Negara Lain

denny@integritylawfirm.id



A. NEGARA AUSTRALIA

denny@integritylawfirm.id

Profesi Advokat di Australia:

Untuk dapat menjalankan profesi advokat di Australia, seseorang terlebih dahulu mendapatkan *Admission* yang mensyaratkan:

- Minimal berusia 18 Tahun;
- Memenuhi standar akademik;
- Lulus pelatihan praktisi hukum (*Practical Training Course*) oleh Legal Admission Board (LAB).

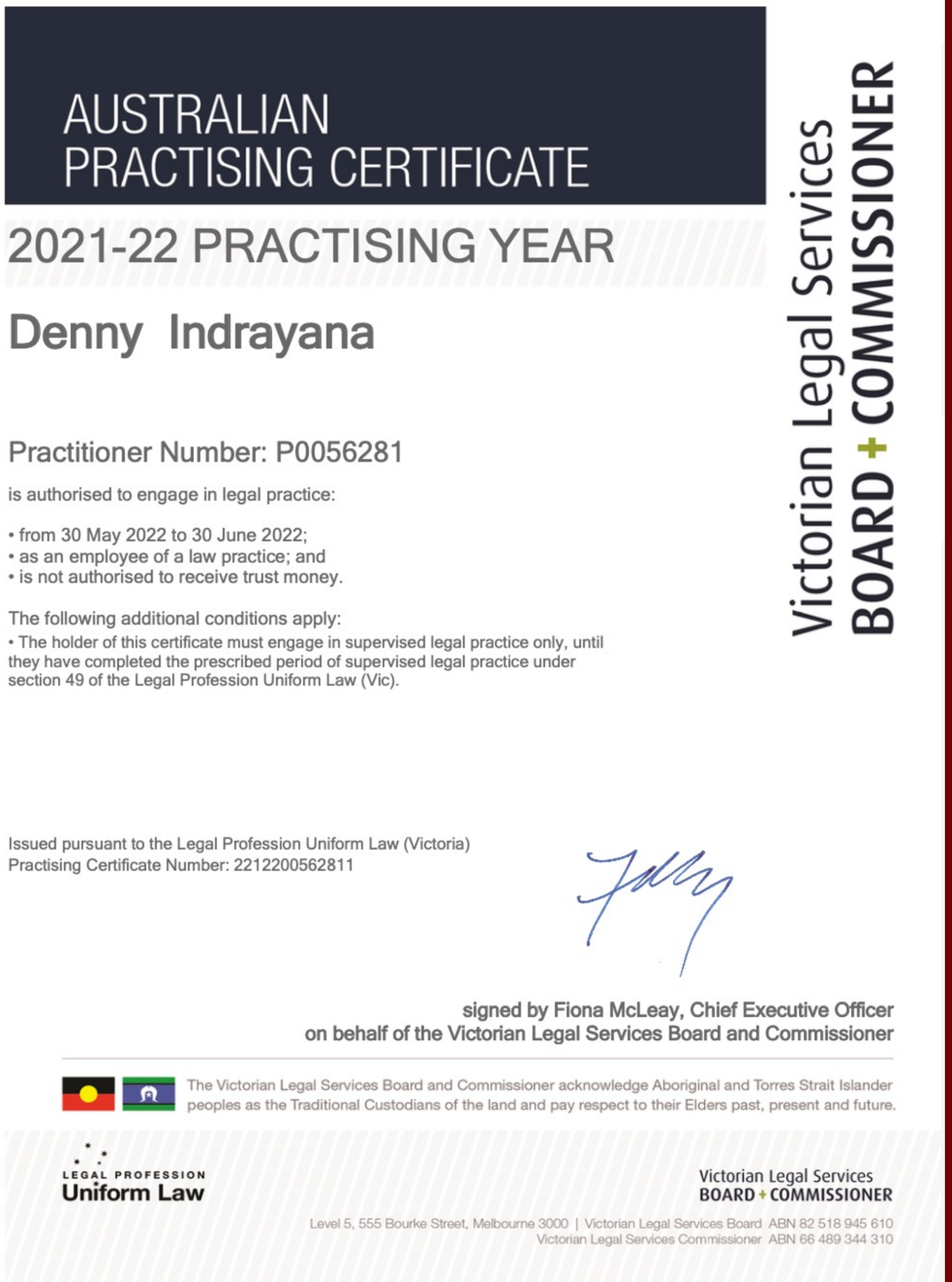


denny@integritylawfirm.id

Persyaratan Pengajuan Admission di Victoria Admission Board (LAB)

IN TE
GRI TY

1. **Akademik**
   Studi di Pendidikan tinggi yang telah diakreditasi oleh LAB minimal 3 tahun dan lulus matakuliah yang ditelah ditentukan;
2. **Identitas**
   Bukti Kewarganegaraan Australia dan Residen bagi Warga Negara Asing
3. **Pelatihan Praktisi Hukum**
   Mengikuti dan lulus pelatihan yang telah disediakan
4. **Bahasa**
   Membuktikan kemampuan berbahasa inggris melalui IELTS dan TOEFL iBT



AUSTRALIAN
PRACTISING CERTIFICATE

2021-22 PRACTISING YEAR

Denny Indrayana

Practitioner Number: P0056281

is authorised to engage in legal practice:

- from 30 May 2022 to 30 June 2022;
- as an employee of a law practice; and
- is not authorised to receive trust money.

The following additional conditions apply:

- The holder of this certificate must engage in supervised legal practice only, until they have completed the prescribed period of supervised legal practice under section 49 of the Legal Profession Uniform Law (Vic).

Victorian Legal Services BOARD + COMMISSIONER

Issued pursuant to the Legal Profession Uniform Law (Victoria)
Practising Certificate Number: 2212200562811

signed by Fiona McLeay, Chief Executive Officer
on behalf of the Victorian Legal Services Board and Commissioner

The Victorian Legal Services Board and Commissioner acknowledge Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the Traditional Custodians of the land and pay respect to their Elders past, present and future.

LEGAL PROFESSION Uniform Law

Victorian Legal Services BOARD + COMMISSIONER

Level 5, 555 Bourke Street, Melbourne 3000 | Victorian Legal Services Board ABN 82 518 945 610
Victorian Legal Services Commissioner ABN 66 489 344 310

Jenis Advokat di Australia:

- **Lawyers**: adalah seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai calon advokat, namun belum boleh melakukan kegiatan praktik.
- **Solicitor**: Adalah Advokat yang memberikan jasa hukum di luar Pengadilan, seperti property dan investasi.
- **Barrister**: Adalah seseorang Advokat yang memberikan jasa hukum litigasi, seperti pembuatan gugatan dan mewakili klien di persidangan.



Sumber:www.owenhodge.com.au

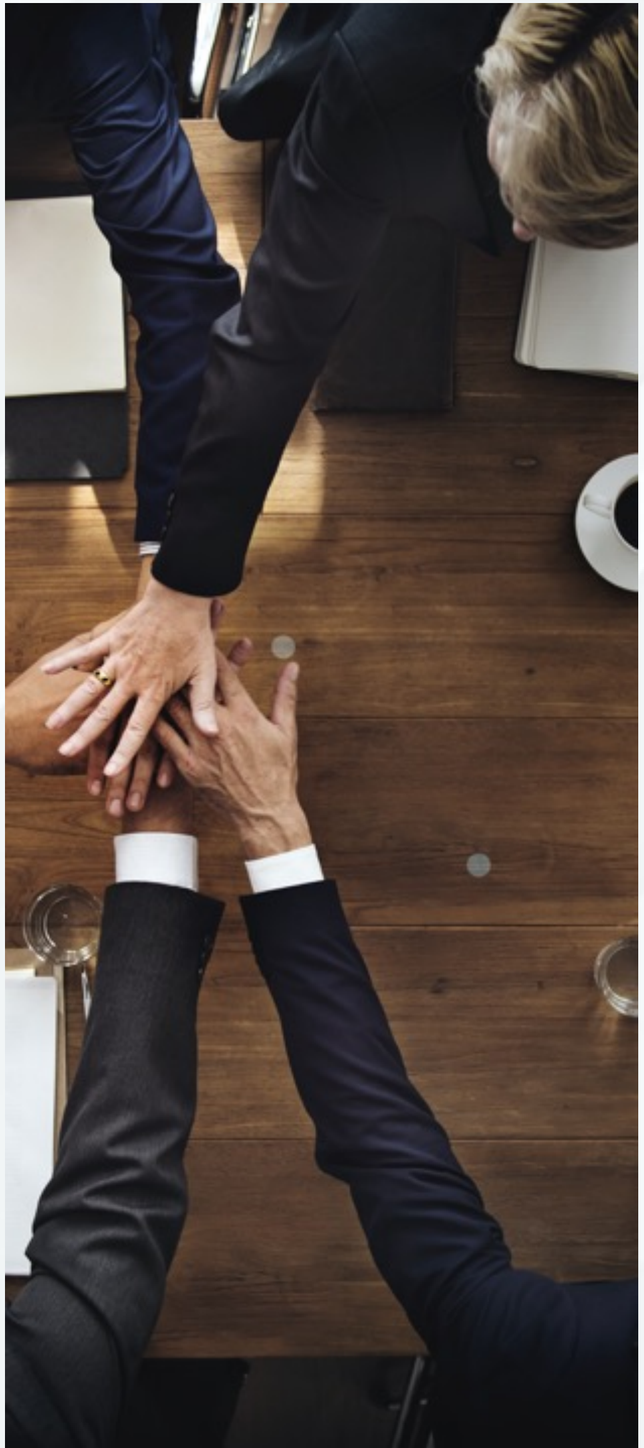
Pembedaan Advokat di Australia

Tidak seperti di Indonesia yang menyatukan pemberi jasa hukum antara di dalam dan di luar pengadilan pada satu terminologi, di Australia terdapat pembedaan terkait domain pemberian jasa

Solicitor, merupakan profesi hukum yang secara umum memberikan nasihat hukum dan melakukan proses hukum sebagian besar di luar pengadilan, seperti legal opinion, mengurus pekerjaan di bidang hukum, mewakili dan melakukan negosiasi.

Barrister, merupakan profesi hukum yang memberikan jasa pada bidang hukum yang berkaitan dengan proses litigasi. Syarat untuk menjadi Barrister ialah solicitor yang telah melewati the *Bar Readers Course* yang diselenggarakan oleh Assosiasi Bar.

Lihat. www.millnerknight.com.au and https://austbar.asn.au/



Hubungan Barrister dan Solicitor dalam Perkara Hukum

- Secara umum seorang Barrister harus menerima detail laporan (*brief*) dari solicitor untuk dapat hadir dalam persidangan;
- Barrister harus memenuhi kapasitas, skill dan pengalaman sebagaimana telah ditulis dalam brief oleh solicitor;
- Solicitor dalam brief yang telah dibuat harus memastikan bahwa Barrister yang akan ditunjuk dapat hadir/mewakili disebabkan tidak ada peraturan yang melarang;
- Barrister menerima besaran pembayaran (*fee*) yang telah direkomendasikan oleh solicitor.
- Barrister dapat melakukan proses perkara tanpa melalui Solicitor jika menurut pendapat yang wajar intruksi soliciter (untuk tidak mengambil proses litigasi) dapat/telah merugikan klien.

Lihat 22 *Legal Profession Uniform Conduct (Barristers) Rules* 2015

denny@integritylawfirm.id

" Appendix A—Supreme Court Scale of Costs

work done on and after 1 April 2021 in relation to matters in the Supreme Court.

STANDAR PEMBAYARAN

Item and Description	*Amount*
1. ATTENDANCES, TRAVEL AND WAITING COSTS	
(a) Attendances requiring legal skill or knowledge by a legal practitioner—	
(i) for each unit of 6 minutes or part thereof;	$42.50
(ii) where a legal practitioner attends the Supreme Court for the purposes of instructing (including conferences with counsel or others on the day of the hearing before or after the Supreme Court sits) per hour or part thereof;	$425.00
(iii) where a legal practitioner appears as counsel, at the discretion of the Costs Court having regard to item 19(1)(a) and (3)	
(b) Where any attendance, requiring legal skill or knowledge, is by an employee of a legal practice who is not a legal practitioner—for each unit of 6 minutes or part thereof	$32.50
(c) Any other attendance, not requiring legal skill or knowledge, capable of performance by a clerk—for each unit of 6 minutes or part thereof	$24.60
(d) Attendances to file or issue any document or similar attendance	$49.20
(e) Travel time is to be allowed at the rate applicable in item 1(a) and item 1(b) where the individual travels in excess of one hour, for such excess	
(f) Waiting time at the Supreme Court is to be allowed at the rate applicable in item 1(a) or item 1(b).	
Where the attendance is by telephone or other electronic means, the charge for an attendance includes the charges made by the communication provider.	
2. DRAWING DOCUMENTS	
All documents whether in printed form or otherwise—for each folio	$62.70
3. ENGROSSING AND/OR APPROVAL OF DOCUMENTS	
Of documents properly drawn by Counsel—for each folio	$12.50
4. REPRODUCTION OF DOCUMENTS	
By photocopy or other machine made copy including hard copies of electronic documents—for each printed side of a page—at the discretion of the Costs Court.	
PERUSALS	
Of all documents including incoming correspondence—	
(a) up to three folios	$63.30
(b) thereafter for each folio	$21.10

SISTEM PEMBAYARAN LAWYERS DI AUSTRALIA



Setiap pembayaran dari hasil pekerjaan advokat (*trust money*) harus diberikan ke akun advokat (*trust account*) milik solicitor/barrister tersebut.

OA di Australia: Multi Bar Atau Single Bar?

Terdapat organisasi advokat pada setiap negara bagian di Australia, namun pada dasarnya mereka adalah bagian dari Associations Bar of Australia (ABA) sebagaimana amanah Chapter 1 Legal Profession Uniform Law.

Untuk dapat menjadi advokat *(solicitor/barrister)* yang mampu beracara di dalam dan di luar pengadilan harus terlebih dahulu memiliki izin yang dikeluarkan oleh OA masing-masing negara bagian.

ABA

- Victorian Legal Services Board (barristers and/or solicitors)
- Queensland Law Society (solicitors)
- Bar Association of Queensland (barristers)
- Law Society of New South Wales (solicitors)
- New South Wales Bar Association (barristers)
- Australian Capital Territory Law Society (solicitors)
- Law Society of Tasmania (barristers and/or solicitors)
- Australian Capital Territory Bar Association (barristers)
- Law Society of South Australia (barristers and/or solicitors)
- Law Society Northern Territory (barristers and/or solicitors)
- Legal Practice Board of Western Australia (barristers and/or solicitors)

denny@integritylawfirm.id

OA di bawah ABA disebut sebagai Legal Service Board *(LSB)*

Legal Service Board **merupakan lembaga publik pada setiap negara bagian di Australia yang bertanggungjawab untuk menjaga kualitas dan pelayanan profesi hukum.**

Article 6.2.3 Legal Profession Act
Legal Service Board **ditujukan untuk:**

1. **Memastikan pengaturan mengenai standar profesi hukum;**
2. **Memberikan perlindungan terhadap klien sebagai konsumen;**
3. **Memastikan terdapat manajemen yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.**

denny@integritylawfirm.id

The Victorian Legal Board merupakan Legal Service Board pada negara bagian Victoria

- Lembaga tersebut akan memberikan izin *local* ***legal practice certificate*** untuk menjalankan profesi advokat pada suatu negara bagian tertentu (Victoria) untuk *Barrister* dan *Solicitor*.
- Pengurus LSB tersebut berasal dari unsur pemerintahan, kejaksaan, akademisi, serta perwakilan organisasi advokat (bar association).

Victorian Legal Services
BOARD + COMMISSIONER

- (Part 3-Local Regulatory Authorities legal profession uniform law application act 2014)

denny@integritylawfirm.id

Legal Practice Certificate akan diterbitkan jika Calon Advokat telah melalui program supervise dari Advokat Senior *(Supervised Legal Practice)*

Telah melewati pelatihan bersama dengan pengawasan *(supervised)* dari Advokat, serta bekerja secara bersama selama 18 bulan.

Telah melewati pelatihan hukum lainnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan selama 2 tahun

2.4.18 Statutory condition regarding supervised legal practice Legal Profession Act 2008

Tidak ada ketentuan yang mensyaratkan kewarganegaraan Australia pada setiap permohonan izin/sertifikat praktisi hukum di Australia, warga negara asing dengan mudah datang dan pergi (fly-in and fly-out) untuk melakukan pekerjaan advokat selama tidak memiliki permasalahan visa.

Lihat. Law Council of Australia: www.lawcouncil.asn.au

denny@integritylawfirm.id

PENGECUALIAN PERSYARATAN

Untuk memudahkan penilaian calon *Solicitor/Barrister* bagi mereka yang telah memiliki kemampuan yang mumpuni, cukup melakukan pembuktian penilaian atau pembebasan/pengurangan *(exemption)* terhadap syarat-syarat yang berlaku. Termasuk syarat Supervised Legal Practice.



Pertimbangan *Exemption:*





- Pendapat hukum yang pernah dibuat;
- Pandangan tentang kebijakan hukum;
- Pembuatan kontrak;
- Kemampuan melakukan pekerjaan paralegal;
- Keanggotaan hakim.

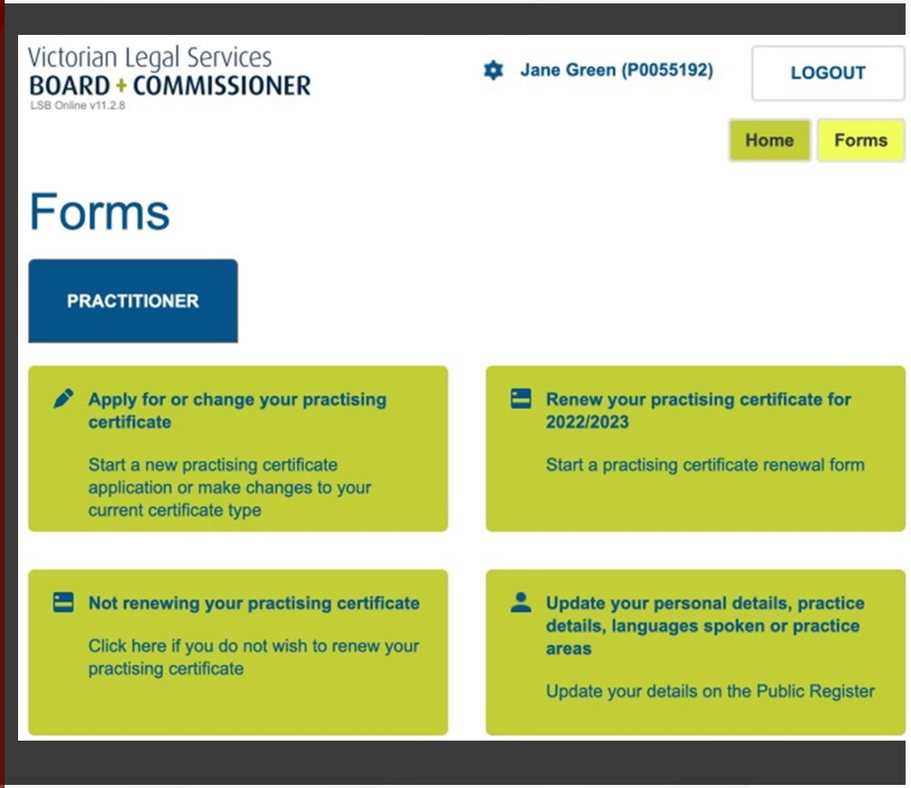
Lihat. S.49 of the Legal Profession Uniform Law (Uniform Law) & Policy Supervised Legal Service 2016

denny@integritylawfirm.id

Syarat Pembaruan Sertifikat Praktisi Hukum di Australia

Sertifikat prakitisi hukum yang berlaku di Australia harus diperbarui oleh pemegang setiap tahun melalui Legal Services Board, dengan mempertimbangkan:

1. Keadaan insolvensi;
2. Riwayat pelanggaran hukum;
3. Menjadi pihak pendisplinan perilaku profesi hukum;
4. Tidak membayar *indemnity insurance*;
5. Riwayat pengeluaran oleh managing corporation / kantor hukum;
6. Kepatuhan terhadap pengadilan;
7. kepatusan terhadap organisasi advokat.



denny@integritylawfirm.id

Tindakan Pendisiplinan Advokat Australia Melalui Pendekatan Restoratif

- “Restoratif” bukan merujuk pada penegakan hukum antara aparatur negara dan korban, melainkan hubungan antara Advokat dan Klien.
- Brown dan Wolf berpendapat “pendekatan restoratif dilakukan untuk memperbaiki hubungan Advokat-Klien melalui pertanggungjawaban terhadap Klien akibat tindakan Advokat.



Lihat. Jennifer Gerarda Brown & Liana G.T. Wolf, The Paradox and Promise of Restorative Attorney Discipline, 12 NEV. L.J. 1, 267–69 (2012).

denny@integritylawfirm.id

Sejarah Penindakan Restoratif



- Pada akhir tahun 1980 di negara bagian New South Wales dan pada awal tahun 1990 di negara bagian Victoria, menetapkan rumusan definisi perilaku Advokat yang dapat dikenakan tindakan disipliner yaitu *unsatisfactory professional conduct* atau perilaku profesional yang tidak memuaskan.

- Berbeda dengan pelanggaran ketentuan perdata, pelanggaran tersebut merupakan perilaku yang tidak memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, berdasarkan penilaian *reasonably competent legal practitioner* atau perilaku yang tidak sesuai kompetensi praktisi hukum.

Lihat: Legal Profession Act 1987 (NSW) s 127(2), inserted by Legal Profession Reform Act 1993 (NSW) sch 2; Legal Practice Act 1996 (Vic) s. 137.

Linda Haller, Restorative Lawyer Discipline In Australia NEVADA LAW JOURNAL (Vol. 12:316)

Mekanisme Penyelesaian

- ***Receipt of Complaint.***

  Dibedakan antara keluhan yang muncul karena sengketa *"civil dispute"* dan perilaku pengacara *"lawyer's conduct"*.

- ***Disciplinary Complaint***

  Persiapan proses sengketa atas perilaku pengacara

- ***Formal Disciplinary Hearings***

  Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan.

- ***Compensation.***

  Di Australia, semua pengacara harus memiliki asuransi ganti rugi profesional *"carry professional indemnity insurance"*.

Lihat. Linda Haller, Restorative Lawyer Discipline In Australia NEVADA LAW JOURNAL (Vol. 12:316)



Dewan Etik Advokat Australia

Setiap OA memiliki Dewan Etik yang berwenang untuk melakukan menerima laporan dan melakukan penyelidikan terhadap anggota Advokat

OA mengajukan gugatan kepada Pengadilan Penegakan Perilaku Profesi Hukum (*The Legal Practitioners Disciplinary Tribunal*) terhadap tindakan tidak menyenangkan (*unsatisfactory professional conduct*) dan pelanggaran profesi (*professional misconduct*) Advokat.

Jika terbukti telah melanggara, Pengadilan berwenang untuk:

- Memberikan Teguran.
- Memerintahkan Advokat yang bersangkutan untuk kembali mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih lanjut dan melakukan konseling.
- Membayar denda hingga $50,000.
- Menangguhkan legal practice certificate milik Advokat paling lama 12 bulan.

Pihak Advokat dapat mengajukan Banding kepada Mahkamah Agung

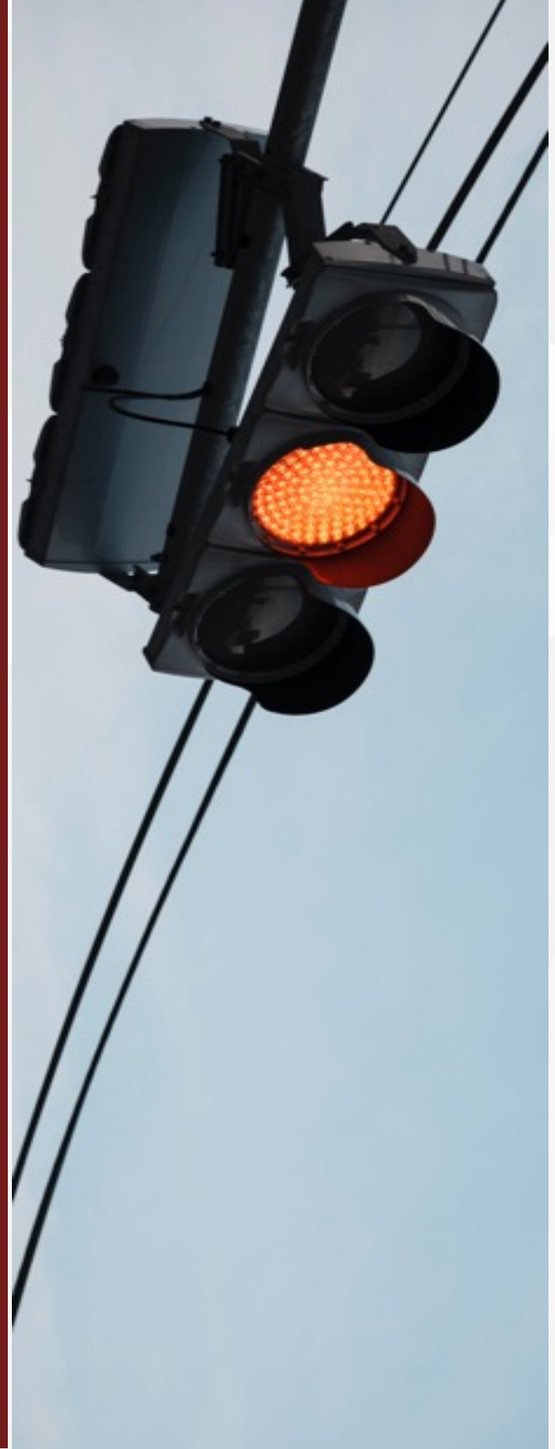


Pengadilan Khusus Penegakan Disiplin Profesi Hukum

Pengadilan Penegakan Disiplin Profesi Hukum (The Legal Practitioners Disciplinary Tribunal) adalah pengadilan independen yang ditunjuk oleh Presiden Pengadilan Tinggi (High Court) untuk mempertimbangkan pengaduan pelanggaran terhadap pengacara. The Legal Practitioners Disciplinary Tribunal memiliki 33 anggota, dengan mayoritas adalah berprofesi non-hukum bersama dengan solicitor dan barrister.



denny@integritylawfirm.id



Etika Bermedia Advokat di Australia

- Advokat (*barrister*) tidak diperbolehkan menyebarluaskan informasi berkenaan dengan proses persidangan dalam hal:
  1. Informasi tersebut diketahui tidak akurat oleh Advokat;
  2. Membuka informasi rahasia;
  3. Tampil atau menyampaikan secara luas opini Advokat mengenai kualitas jalannya persidangan kecuali pada forum edukasi atau akademik mengenai hukum.
  4. Menampilkan materi/dokumen persidangan dengan persetujuan klien dan tidak bertentang dengan peraturan.

Lihat: 76 *Legal Profession Uniform Conduct (Barristers) Rules* 2015

Perkembangan/Tantangan Profesi Advokat (Kantor Hukum) di Australia

MUNCULNYA *MULTI-DISCIPLINARY PARTNERSHIPS* (MDPS)

MDPS adalah kantor hukum yang memberikan layanan secara komprehensif mengenai bisnis, tidak hanya mengenai hukumnya, melainkan juga mengenai sektor lain, seperti pajak, lingkungan, akuntansi, dan lain sebagainya.

Pada satu sisi, konsep ini bagus untuk memberikan *one-stop solution* terhadap layanan hukum bisnis. Di sisi lain, menimbulkan degradasi terhadap pemahaman aturan profesi advokat di Australias. Karena kantor hukum lebih banyak di isi oleh professional dari bidang lain (di luar Advokat), sehingga cenderung lebih komersil.

Sumber: Law of Society of Western Australia - the Future of Legal Profession 2017



B. NEGARA CANADA

denny@integritylawfirm.id

Profesi Advokat di Kanada:

Profesi advokat di Kanada dilakukan oleh Lawyers, baik di dalam dan maupun di luar pengadilan

Sebagai konsekuensinya calon advokat harus melewati solicitor examination dan barrister examination pada setiap Organisasi Advokat (Law Society) masing-masing negara bagian

Setiap OA pada masing-masing negara bagian berwenang untuk menetapkan dan melakukan penegakan etika profesi terhadap anggota advokat OA.

Sumber: Thomsom Reuters Practical Law



denny@integritylawfirm.id

OA KANADA: MULTI BAR DALAM SATU KOORDINATOR

Mengenal Law Society

Law Society adalah sebutan untuk OA di masing-masing negara bagian Kanada.

Law Society merupakan organisasi profesi yang dibangun oleh masyarakat Kanada sejak Abad 18, penyelenggaraannya dilakukan secara mandiri dan bebas dari pemerintahan dalam pembelajaran, pelatihan, serta uji kelulusan profesi hukum.

Meski Law Society dijalankan secara privat dan mandiri, setiap Law Society pada negara bagian memiliki legalitas berdasarkan peraturan perundang-undang negara bagian, karenannya Law Socety di pandang sebagai badan publik





Kesatuan dalam Federation of Law Society of Canada

Pada tahun 1972, 11 Law Society di Kanada melakukan pertemuan Conference of Governing Bodies of the Legal Profession in Canada dan berhasil menciptakan badan kordinator Law Society melalui The Federation Of Law Societies Of Canada (FLC)

Keputusan FLC dibuat oleh perwakilan tiap-tiap Law Society pada sebuah forum *Initiative* (inisiasi), produk yang dihasilkan adalah sebuah inisiasi. Kemudian setiap inisiasi akan disahkan menjadi peraturan pada tiap-tiap Law Society

Semangat pendirian FLC didasarkan pada pelayanan hukum yang menjunjung tinggi kepentingan masyarakat melalui konsistensi standar penilaian dan penerimaan lawyers.

denny@integritylawfirm.id

Membangun Standar Etika yang Seragam



- Pada tahun 2009 berdasarkan FLC berhasil menghadirkan *Model of Professional Conduct* yang mengharmonisasi seluruh ketentuan etika dan perilaku profesi hukum di Kanada.
- Pada saat yang bersamaan didirikan *National Discipline Standards* yang menetapkan bagaimana perilaku disiplin profesi dapat dijalankan dan tata cara menangani komplain atau aduan yang tidak sesuai dengan standar etika dan perilaku profesi hukum.

denny@integritylawfirm.id

Pembenahan Kompetensi Advokat

- Pada Oktober tahun 2009, FLC turut berhasil menciptakan National Competency Profile dan National Fitness and Suitability Standard yang dijadikan dasar pembelajaran seluruh calon lawyers di Kanada.
- Pada tahun 2015, Panitia Khusus FLC membuat kebijakan The National Requirement, yang secara tidak langsung mewajibkan fakultas hukum untuk menyesuaikan materi pembelajarannya agar lulusan fakultas tersebut dapat diterima oleh Law Society.
- Kebijakan ini menuntut agar setiap fakultas hukum di seluruh Kanada, dapat memberikan materi yang selalu sesuai dengan kebutuhan lawyers.



denny@integritylawfirm.id



C. NEGARA SINGAPURA

denny@integritylawfirm.id

Profesi Advokat di Singapura:

Untuk dapat menjalankan profesi advokat di Singapura, seseorang harus:

- Lulusan sekolah hukum yang diakui oleh Singapore Institute of Legal Education (SILE);
- Berusia setidaknya 21 tahun;
- Memiliki karakter yang baik;
- Telah menempuh pelatihan praktik profesi dari Lembaga yang diakui SILE;
- Lulus ujian hukum dari SILE;
- Mendapatkan Practice Certificate dari OA;
- Disahkan oleh Supreme Court Singapura.

NOTE: Singapura tidak membedakan jenis antara *Solicitor* dengan *Advocate,* namun OA Singapura mengharuskan setiap lawyer memiliki spesialisasi hukum masing-masing.



denny@integritylawfirm.id

Source: https://www.lawsociety.org.sg/the-law-society/practice-areas/

OA di Singapura



Law Society adalah sebutan untuk OA di Singapura. Hanya terdapat 1 (satu) OA di Singapura yakni **The Law Society of Singapore (LSS).**

Setiap Advokat yang memiliki izin di Singpura, baik Advokat lokal maupun asing, secara otomatis bergabung menjadi anggota dari LSS.

Kewenangan LSS:

1. *LSS berwenang mengeluarkan Practice Certificate (PC), namun penyelenggaran pelatihan dan ujian advokat dilakukan oleh SILE.*

2. *LSS berwenang memberikan sanksi etik kepada advokat. Namun putusannya dapat diajukan banding ke SGHC (Singapore High Court).*

denny@integritylawfirm.id



D. NEGARA AMERIKA SERIKAT

denny@integritylawfirm.id



Profesi Advokat di Amerika:

Untuk dapat menjalankan profesi advokat di Amerika, seseorang harus:

- Lulusan strata Sarjana-1 pada semua program studi;
- Lulusan sekolah hukum *(law school)* pasca program sarjana-1 yang diakui oleh American Bar Association (ABA) dengan gelar *Jurist Doctor* (JD);
- Lulus ujian Asosiasi Negara Bagian;
- Disahkan oleh *Supreme Court* masing-masing negara bagian.

denny@integritylawfirm.id

OA di Amerika



Hampir sama dengan di Austrlia, OA di Amerika terdiri dari 2 (dua) jenis:

1. **National Bar,** yakni ABA; dan
2. **Local/State Bar**, yakni Asosiasi yang eksis di setiap masing-masing negara bagian.

NOTE:
Masing-masing Local Bar memliki kewenangan yang luas terhadap setiap Advokat yang menjadi anggotanya, meliputi penerbitan perizinan serta penegakkan sanksi.

Sementara kewenangan ABA hanya pada menyusun standar kurikulum sekolah hukum dan acuan penyusunan kode etik bagi Local Bar.



3| Perihal Kewenangan Advokat

denny@integritylawfirm.id

KEWENANGAN ADVOKAT

Pada dasarnya, baik di Indonesia dan negara lainnya ***tidak dikenal istilah kewenangan (authority)*** *yang diberikan kepada Advokat.*

Namun, dalam berbagai regulasi, ***rumusan kewenangan tersebut dapat dilihat dari rumusan hak (rights), kewajiban (obligation/duty), atau peran (role)*** *yang dimiliki oleh Advokat.*



denny@integritylawfirm.id

INDONESIA

UU ADVOKAT
Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang pengadilan dengan berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 UU Advokat)
Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela perkara dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 UU Advokat)
Tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan dalam sidang pengadilan. (Pasal 16 UU Advokat)
Memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan guna pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (pasal 17)
Berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. (pasal 19 ayat (2))
Berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan, yang besarnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. (Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2))
Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena adanya hubungan profesi. (Pasal 19 ayat (1) UU Advokat)
Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (Pasal 22 ayat (1) UU Advokat)

denny@integritylawfirm.id

INDONESIA

KUHAP	UU KEKUASAAN KEHAKIMAN
Memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan. (Pasal 54 KUHAP)	Melakukan pelayanan bantuan hukum (pasal 9 huruf b)
menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. (pasal 69 KUHAP)	Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum (pasal 9 huruf c)
Menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (pasal 70 ayat (1) KUHAP)	Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum. (pasal 9 huruf d)
Menerima “turunan berita acara pemeriksaan” (pasal 72 KUHAP)	Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan (pasal 9 huruf e)
Mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. (pasal 73 KUHAP)	Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan (pasal 9 huruf f)
	Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum. (pasal 9 huruf g)

denny@integritylawfirm.id

KEWENANGAN BERTINDAK SEBAGAI PENUNTUT UMUM

Legal Profession Uniform Conduct (Barrister) Rules 2015:

Article Definitions:

Prosecutor means a barrister who appears for the complainant or Crown in criminal proceedings.

83 Prosecutor's duties

A prosecutor must fairly assist the court to arrive at the truth, must seek impartially to have the whole of the relevant evidence placed intelligibly before the court, and must seek to assist the court with adequate submissions of law to enable the law properly to be applied to the facts.

84 A prosecutor must not press the prosecution's case for a conviction beyond a full and firm presentation of that case.

85 A prosecutor must not, by language or other conduct, seek to inflame or bias the court against the accused.

86 A prosecutor must not argue any proposition of fact or law which the prosecutor does not believe on reasonable grounds to be capable of contributing to a finding of guilt and also to carry weight.

87 A prosecutor must disclose to the opponent as soon as practicable all material (including the names of and means of finding prospective witnesses in connection with such material) available to the prosecutor or of which the prosecutor becomes aware which could constitute evidence relevant to the guilt or innocence of the accused other than material subject to statutory immunity, unless the prosecutor believes on reasonable grounds that such disclosure, or full disclosure, would seriously threaten the integrity of the administration of justice in those proceedings or the safety of any person.

88 A prosecutor who has decided not to disclose material to the opponent under rule 87 must consider whether:

(a) the charge against the accused to which the material is relevant should be withdrawn, and

(b) the accused should be faced only with a lesser charge to which such material would not be so relevant.

NOTE: Barrister di Australia dianggap sebagai profesi yang independent. Oleh karena itu, barrister dapat juga ditunjuk sebagai penuntut umum dan harus menjalankan tugas penuntutannya dengan kaidah yang diatur dalam Legal Profession Uniform Conduct (Barrister).

denny@integritylawfirm.id

AUSTRALIA

AMERIKA

KEWENANGAN MEMANGGIL SAKSI

Code of Virginia section 8.01-407:

"… **a summons may be issued by an attorney-at-law** who is an active member of the Virginia State Bar at the time of issuance, as an officer of the court. **An attorney-issued summons shall be on a form approved by the Supreme Court**, **signed by the attorney** and shall include the attorney's address. The summons and any transmittal sheet shall be deemed to be a pleading to which the provisions of § 8.01-271.1 shall apply."

"The law governing summonses issued by a clerk shall apply mutatis mutandis. When an attorney-at-law who is an active member of the **Virginia State Bar transmits one or more attorney-issued subpoenas to a sheriff to be served in his jurisdiction,** such subpoenas shall be accompanied by a transmittal sheet."

"Failure to respond to any such summons **shall be punishable by the court** in which the proceeding is pending as for contempt."

NOTE: Terdapat beberapa kasus spesifik di mana kewenangan pemanggilan tidak dapat dilakukan, utamanya pada kasus-kasus perdata *(civil proceedings)*

denny@integritylawfirm.id

USULAN DALAM RKUHAP

Mengingat Advokat adalah profesi penegak hukum yang sejajar dengan aparat penegak hukum lain (Hakim, Jaksa, Polisi), maka sudah sepatutnya **kewenangan Advokat dirumuskan secara tegas dan jelas dalam Bab khusus** mengenai Kewenangan Advokat, khususnya dalam RKUHAP.

BAB X
KEWENANGAN PENASEHAT HUKUM/ADVOKAT

Paragraf 1
Kewenangan dalam Proses Penyelidikan/Penyidikan

Paragraf 2
Kewenangan dalam Proses Penuntutan

Paragraf 3
Kewenangan dalam Proses Persidangan

denny@integritylawfirm.id

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy









https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/

denny@integritylawfirm.id



https://www.integritylawfirm.id


IN
TE
GRI
TY
We are the INTEGRITY

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

